



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

CAPAIAN KINERJA MAKRO

2023

2024

Indeks Pembangunan Manusia

74,13%

74,68%
▲ 0,742%

Pertumbuhan Ekonomi

5,06%

5,06%
● 0%

Angka Kemiskinan

4,70%

4,53%
▼ -3,617%

Pendapatan Perkapita

6,47%

6,96%
▲ 7,573%

Angka Pengangguran

8,51%

7,92%
▼ -6,933%

Ketimpangan Pendapatan

0,274%

0,277%
▲ 1,095%

catatan : Jika laju pertumbuhan naik dengan simbol ▲ jika turun dengan simbol ▼ namun jika tidak berubah diberi simbol ●
Sumber : BPS Kota Singkawang Tahun 2024

Hasil EPPD Tahun 2023 Atas LPPD Tahun 2022

- Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Provinsi dan Kabupaten/Kota berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 2,9173 dan status kinerja Sedang.

Opini Laporan Keuangan

- Berdasarkan Resume LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 Nomor : 30.A/LHP/XIX.PNK/5/2024 tanggal 21 Mei 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .

Sumber : Inspektorat Kota Singkawang Tahun 2024

Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Urusan Pendidikan

No.	Usuan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Pemmasalahan yang Dihadapi
1.	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 4. Tingkat partisipasi warga negara usia 16-24 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	25,689%90,033% 84,378% 45,428%	1. Masih rendahnya capaian partisipasi sekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan standar pelayanan minimal terutama pada bidang Pendidikan Anak Usia Dini. 3. Masih terdapat anak yang belum terlayani dalam lembaga PAUD, khususnya tempat pelayanan pendidikan PAUD masih kurang. 4. Perlu penambahan LMS Sekolah Baru untuk TK Negeri karena masih banyak anak usia 5-6 Tahun yang belum mendapatkan pendidikan TK dikarenakan biaya yang cukup besar untuk masuk ke TK Swasta. 5. Masih belum meratanya akses pada Pendidikan Kesetaraan sehingga belum dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. 6. Kurangnya pemahaman tenaga pendidik terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran. 7. Terdapat tenaga pendidik yang masih belum memenuhi standar kualifikasi (SNP-1). 8. Kurang terlayani pendidik PNS di jenjang SD dan SMP. 9. Tenaga kependidikan di setiap jenjang pendidikan masih sangat sedikit, sehingga tenaga pendidik di sekolah menanggung beban tenaga kependidikan, dan mengakibatkan tenaga pendidik tidak dapat fokus dalam proses pembelajaran di kelas.

Urusan Pekerjaan Umum

No.	Usuan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Pemmasalahan yang Dihadapi
4.	Pekerjaan Umum	1. Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terdudung oleh infrastruktur pengendalian banjir di WIS Kewenangan Kabupaten 2. Rasio luas kawasan pemukiman separang pantai rawan abrasi, erosi, dan aksi yang terdudung oleh infrastruktur pengendalian banjir di WIS Kewenangan Kabupaten 3. Rasio luas daerah tanggul kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi 4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM (jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terdudung) terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota 5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengadangan air limbah domestik 6. Rasio keptuhan IMB kab/kota 7. Tingkat Kematangan Jalan kabupaten/kota yang memiliki sertifikat kompetensi 8. Rasio tingkat operabilitas/standarisasi yang memiliki sertifikat kompetensi 9. Rasio proyek yang memiliki kewenangan pengawasannya tanpa kecekatan komunikasi	8,799% 20,804% 65,397% 49,561% 87,116% 100% 100% 99,554%	1. Jumlah Sumber mata air yang terbatas akibat pemenuhan peningkatan jumlah penduduk di kota Singkawang. 2. Pada area jalur-jalur pemukiman yang sempit terdapat balakan drainase, sehingga pemersangan pipa hulu dapat dilakukan di saluran drainase. 3. Tidak adanya akses untuk memasang pipa pada bukit banjir. 4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM (jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terdudung) terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota 5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengadangan air limbah domestik 6. Rasio keptuhan IMB kab/kota 7. Tingkat Kematangan Jalan kabupaten/kota yang memiliki sertifikat kompetensi 8. Rasio tingkat operabilitas/standarisasi yang memiliki sertifikat kompetensi 9. Rasio proyek yang memiliki kewenangan pengawasannya tanpa kecekatan komunikasi

Urusan Kesehatan

No.	Usuan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Pemmasalahan yang Dihadapi
2.	Kesehatan	1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Dukung 2. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 3. Persentase RS rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	5,340% 100% 80,519%	1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan kehamilannya sedini mungkin 2. Data pelayanan ibu hamil belum optimal dari segi kecekatan 3. Belum semua tes skrining klinik dan PMB tersedia di dokter dan alat USG untuk melayani pemeriksaan kehamilan 4. Belum semua dokter dilatih penggunaan USG
		4. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan persalinan 5. Persentase bayi lahir dengan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	87,345% 87,639%	1. Masih dituntut pertolongan persalinan oleh tenaga non kesehatan 2. Masih belum optimalnya Data pelayanan persalinan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan 3. Masih kurangnya keterampilan pelayanan Kesehatan dan pelayanan BBL
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	33,622%	1. Masih rendahnya partisipasi keluarga untuk pemeriksaan Kesehatan balita secara rutin setiap bulan 2. Masih terdapat balita yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap 3. Belum semua kader terlatih dalam pelayanan balita di posyandu 4. Masih terdapat wilayah yang tidak terpenuhi penyediaan sasaran target dasar 5. Masih ada posyandu yang belum memiliki peralatan antropometri sesuai standar 6. Ponekasan dan pelayanan pelayanan balita di teskes belum maksimal
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	67,928%	Melalui target yang ditentukan
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	28,181%	1. Saranan yang ditetapkan oleh Pusdatin berdasarkan Risetkedis besar. 2. Kompetensi SDM dalam memberikan standar pelayanan pada usia reproduktif belum memadai 3. Kesadaran masyarakat usia produktif melakukan skrining sesuai standar masih rendah.
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	45,442%	1. Kurangnya partisipasi keluarga untuk pemeriksaan kesehatan sesuai standar 2. Ponekasan dan pelayanan pelayanan kesehatan lansia belum optimal 3. Masih kurangnya tenaga Kesehatan yang terlatih pelayanan Kesehatan lansia 4. Perhatian posyandu lansia masih kurang
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12,750%	1. Saranan yang ditetapkan oleh Pusdatin berdasarkan Risetkedis besar. 2. Kompetensi SDM dalam memberikan standar pelayanan pada usia reproduktif belum memadai 3. Kesadaran masyarakat usia produktif melakukan skrining sesuai standar masih rendah.
		11. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	59,393%	1. Saranan yang ditetapkan oleh Pusdatin berdasarkan Risetkedis besar. 2. Kompetensi SDM dalam memberikan standar pelayanan pada usia reproduktif belum memadai 3. Kesadaran masyarakat usia produktif melakukan skrining sesuai standar masih rendah.
		12. Persentase ODGJ berobat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	78,427%	1. Kompetensi ODGJ dilayani belum maksimal. 2. Kompetensi Tim Kesehatan Jiwa Puskesmas belum memadai 3. Jenis Obat yang diperlukan untuk ODGJ tidak tersedia lengkap di Puskesmas.
		13. Persentase orang terdapat TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	125,588%	1. Penemuan dan pelayanan pasien TB (termasuk RS) tidak tepat waktu karena SDM TB kurang optimal 2. Mekanisme komunikasi/pengantar internal RS kurang optimal
		14. Persentase orang terdapat infeksi HIV mendapat pelayanan sesuai standar	79,312%	1. Penemuan dan pelayanan pasien HIV belum maksimal (0%) dan belum memiliki kemampuan tesfaser dari tesid seluruh sasaran

Urusan Trantibum Linmas

No.	Usuan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Pemmasalahan yang Dihadapi
5.	Kemertan, Ketertiban, Perindugunan Masyarakat	1. Persentase Gempolan Transilum yang dapat dilekalisasi 2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi mengenai bencana 4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi kesiapsiagaan bencana 6. Waktu tanggap responsif (RTR) dalam penanganan kebakaran 7. Jumlah aparat pemadam kebakaran yang terlatih dan terakreditasi	100% 100% 1,250% 0,640% 100% 100% 7,69%	1. Masih kurangnya personel yang ada 2. Masih kurang latihan nyal dan masih minimnya PERDA dan PERKADA, masih banyak nya PHL disetiap jenjang yang kurang untuk bekaluan. 3. Tidak ada nya aparat pemadam kebakaran 4. Pencilatan yang kurang lengkap dan belum sesuai dengan kebutuhan 5. Tidak adanya sarana dan prasarana pemadam kebakaran 6. Belum selesainya Dokumen Penanggulangan Risiko Bencana dalam Rencana Tata Ruang dan Dokumen Kajian Resiko Bencana Tahun 2022-2027. 7. Belum optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana

Urusan Sosial

No.	Usuan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Pemmasalahan yang Dihadapi
6.	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terdapat, anak terdapat, lanjut usia terdapat dan gelandangan/pemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar rumah 2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 3. Terbayarnya/kuantanya SDM yang profesional sebagai Petugas Sosial Profesional pada PKKS terdapat 4. Perlu nya perhatian pendataan untuk verifikasi validasi data yang sudah ada 5. Minimnya terdapat pendukung/peserta kerja selevel rumah singgah, 6. Selain pemmasalahan yang berasal dari internal atau juga permasalahan eksternal yang menjadi kendala dalam penanganan PKKS, misalnya menjadi PKKS yang tidak mau berubah dan identitas kelompok PKKS yang bukan warga singkawang.	70,097% 100% 100%	4. Belum semua indikator Rehabilitasi Bidang Sosial yang merupakan elemen SPN dapat terpenuhi, karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. 5. Jumlah Pemerhati Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKKS) sangat terbatas 6. Terbayarnya/kuantanya SDM yang profesional sebagai Petugas Sosial Profesional pada PKKS terdapat 4. Perlu nya perhatian pendataan untuk verifikasi validasi data yang sudah ada 5. Minimnya terdapat pendukung/peserta kerja selevel rumah singgah, 6. Selain pemmasalahan yang berasal dari internal atau juga permasalahan eksternal yang menjadi kendala dalam penanganan PKKS, misalnya menjadi PKKS yang tidak mau berubah dan identitas kelompok PKKS yang bukan warga singkawang.

Sumber : SILPDP Kota Singkawang Tahun 2024

Realisasi APBD Kota Singkawang Tahun 2024

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Pendapatan Daerah	1.012.278.457.648,00	1.012.015.140,58	100,05
	Pendapatan Asli Daerah	251.573.183.462,00	272.080.297.920,58	108,15
	Pendapatan Transfer	760.705.274.186,00	740.698.717.220,00	97,37
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0
2	Belanja Daerah	1.048.689.016.444,45	999.666.500.730,71	95,33
	Belanja Operasi	864.636.363.892,45	826.423.324.382,83	95,58
	Belanja Modal	182.168.622.708,00	173.232.176.347,88	95,09
	Belanja Tidak terduga	1.884.029.844,00	11.000.000,00	0,58
3	Pembiayaan Daerah	36.410.558.796,45	36.410.558.796,45	100
	Penerimaan Biaya	69.188.547.164,45	69.188.547.164,45	100
	Pengeluaran Biaya	32.410.558.796,45	32.410.558.796,45	100

Sumber : BPKAD Kota Singkawang Tahun 2024

Inovasi Daerah Kota Singkawang Tahun 2024

- Tratid Indah (Strategi Peningkatan Indeks Inovasi Daerah) dari BAPPEDA
- KLINIK PENGAWASAN dari Inspektorat Singkawang
- SIGAP WEB (Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah) dari BAPENDA
- SIRAJA BANGKIT (Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Melalui Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi) dari BKPSDM
- SI OLGA (Sistem Informasi Keolahragaan) dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- SINAR PIJU (Sistem Informasi Penerangan Jalan Umum) dari Dinas Perhubungan
- ATENSI (Aksi Tilang Terpadu Sidang di Tempat) dari Dinas Pehubungan
- SIBALE DEKSTOP (Sistem Informasi Bayi Lahir) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- SILACAK (Sistem Informasi Layanan Pencatatan Perkawinan) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- SI MERA MENOR (Aplikasi Media Reklame Untuk Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan) dari Dinas PUPR
- Sipetani Agrical (Transformasi Penyuluhan Pertanian Melalui Agrical) dari Dinas Pertanian
- SILAWANG (Sistem Koordinasi dan Pelayanan Masalah Sosial Singkawang) dari Dinas Sosial
- SIAPP (Sistem Informasi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah) dari Satpol PP
- Bank Sampah Unit (BSU) MATAHARI dari Diskominfo
- Pengembangan SI PETA (Sistem Informasi Pertanian terpadu) dari Dinas Perkimta
- UMI Fest dari Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
- GS3KL (Gerakan Satu Sekolah Satu Kearifan Lokal) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- APLIKASI SIPAD GURU (Sistem Informasi pendataan Administrasi guru) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- PELANGI CATIN (Pelayanan Gigi Calon Pengantin) dari Dinas Kesehatan dan KB
- PEDEKAR CATIN (Pelayanan dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Tiap Keagamaan) dari Dinas Kesehatan dan KB
- MOMMY CHAT (obrolan Ibu hamil dan Ibu Nifas) dari Dinas Kesehatan dan KB
- Program 1 RT 1 Desa Wisma dari Kecamatan Singkawang Utara
- PELAWA (Pelayanan informasi Administrasi Melalui Whatsapp) dari Kecamatan Singkawang Timur
- PULOR CENTING (Puding Kelor Cegah Stunting) dari Kecamatan Singkawang tengah

Sumber : BAPPEDA Kota Singkawang Tahun 2024

Sekretariat Daerah Kota Singkawang
Bagian Pemerintahan